

PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK ANTARETNIK

by Dodot Sapto Adi

Submission date: 08-Feb-2018 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 912769980

File name: 09_PengelolaanPotensiKonflikAntaretnikDodot.pdf (118.88K)

Word count: 2599

Character count: 17758

PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK ANTARETNIK

Dodot Sapto Adi

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

dodotrebelian@yahoo.com

Abstrak

Posisi etnik tertentu dalam kehidupan sosial-budaya, ekonomi maupun politik masih menyimpan sejumlah persoalan. Masih sering muncul penilaian yang bersifat *pejoratif*. Artinya pemberian predikat tertentu dalam bentuk karakter yang menunjukkan bahwa etnik tersebut tidak mampu memberikan kepuasan sosial bagi masyarakat setempat. Meskipun seringkali ditampakkan kesamaan tempat lahir, praktek budaya dan penggunaan bahasa yang sama, ternyata belum mampu menghapus kesan terhadap warga pendatang. Potensi konflik bisa menjadi penyulut kerusuhan sosial dari waktu ke waktu. Keberadaan konflik atau ketidakselarasan kepentingan bila lebih menonjol tumbuhnya kesenjangan diantara yang terlibat.

Intensitas komunikasi dalam konteks antarpribadi dan kelompok semakin menjadi amat penting untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai stabilitas dan keberlangsungan hidup dalam masyarakat yang multi etnik. Dari sinilah peran terbesar dipikul oleh komunitas etnik mayoritas. Interaksi sosial yang arahnya membangun kesadaran untuk membuka diri terhadap realitas sosial yang ada, akan dapat meningkatkan keterlibatan dalam dialog sosial yang murni, dan secara konstan menyediakan waktu untuk menanggapi tuntutan-tuntutan baru yang berasal dari situasi yang berkembang.

Lebih lanjut kebiasaan baru tersebut, akan menjadi transformasi sosial di dalam aspek struktural, sikap dan perilaku nyata dari anggota masyarakat. Adapun transformasi sosial yang dapat ditawarkan meliputi : (1) *Transformasi Struktural*. Jika akar penyebab konflik terletak dalam struktur hubungan berdasarkan lingkungan tempat tinggal antara pihak-pihak yang bertikai, maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang ada atau mungkin ada. (2) *Transformasi Aktor*. perubahan yang dilakukan oleh aktor-aktornya sendiri, perubahan pola kepemimpinan, serta perubahan dalam cara mengadopsi nilai-nilai dan keyakinan yang masih baru. (3) *Transformasi Persoalan*. Setiap muncul isu atau informasi baru, maka konflik yang ada dan berkembang akan kehilangan sifatnya yang khas, dan mengalami perubahan yang nyata. Dengan demikian akan dapat ditata kembali persoalan yang akhirnya dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang ada atau mungkin berkembang. (4) *Transformasi Kelompok dan Personal*. Konflik bersumber dari dalam hati dan pikiran manusia. Untuk mengatasinya perlu ditransformasikan ke dalam *aloha* (rekonsiliasi), *adosa* (saling mengakui), dan *amoha* (visi yang jelas dan luas).

Kata kunci : etnik, konflik, transformasi, komunikasi.

Abstract

With around more than 1000 separate ethnic categories living within a total population of 240 million, Indonesia is one of the world's great multi-ethnic societies. With this demographic setting, inter-racial and other inter-communal conflicts have potentials to emerge unless those Interethnic harmonious relations are well managed by the related concerning parties. Prejudice which exists among race and ethnic member has potentially to spark communal conflicts. Common features of prejudice include negative feelings, stereotyped beliefs, and a tendency to discriminate against members of the group can result in social unrest.

An intensive interpersonal and inter-communal communication, as such is badly needed in order to establish and maintain social harmony and guarantee the sustainable social life within this multi-race nation. This harmonious social interaction which aims to raise awareness among the ethnic member on the importance of opening themselves (self-openness) to the external social, economic and political changes is of paramount role for pure social dialogue to take place. This awareness will pave the way for social transformation to occur within their daily livelihood. For this to take place, the majority ethnic should take the at the forefront leadership to engage this process. When the social transformations process is smoothly implemented, it will bring about dramatic changes in terms of their attitudes, behavior and other social structures.

This social transformation can take place in four forms. First, structural transformation which means that potential conflict involves structural relations among the parties living in certain geographical territory. Thus, any structures that hinder the amicable co-existence between the two parties should be resolved by lifted them up in mutually consensual manner agreed upon by them. Second, Actor related transformation which covers thing such as key player attitude and behavior among them. Thus any attitude, behavior and values and norms which block their amicable co-existence should be altered to the one that encourages social harmony. Similarly, this should be done in agreeable manner. Third, issue related transformation which covers any issue or rumor which potentially disrupts their social harmony should be discussed together and interpreted mutually with the help of a mediating party so that the current existing co-existence can be maintained. Fourth, group and personal transformations which involve that any conflict comes from men's emotion and thought. Altering those feelings and thinking among the conflicting parties according to Buddhist teachings is necessary requirement for resolving the tension. It further state that the conflict resolution can be completed by means reconciliation (aloba), reciprocal recognition (adosa) and widening one thinking horizon through enlightened reason (amoha).

Key Word: ethnic, Conflict, Transformation, Communication

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa yang tersebar dalam berbagai wilayah. Perbedaan masing-masing dari sisi asal daerah, bahasa, agama, dan sebagainya juga menunjukkan semakin tingginya keberagaman. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadi proses asimilasi melalui akulturasi, amalgamasi, integrasi dan sebaliknya. Ditinjau dari dimensi sosial atas berbagai kelompok tersebut, berada dalam satu kesatuan komunitas yang mempunyai posisi sama sebagai warga atau anggota masyarakat etnik tertentu, meskipun secara struktural komunitas yang berada dalam berbagai lapisan dan situasi geografis yang berbeda. Namun dalam sisi budaya akan

tampak, bahwa berbagai kelompok itu merupakan suatu komunitas yang beragam. Keberagaman satuan etnik itu merupakan karakteristik yang dimiliki individu atau kelompok seperti watak, sikap ataupun budaya kelompok (12). Dengan keberagaman tersebut, terutama pada aspek budaya, akan tampaklah perbedaan antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya.

Hubungan antar etnik tidak selalu menjurus kepada konflik sosial, melainkan diharapkan dapat berwujud kehidupan bersama secara rukun dan serasi, mencapai taraf integrasi tanpa prasangka atau kecurigaan hanya karena perbedaan ras, suku, asal-usul keturunan, agama dan kepercayaan. Walaupun varian yang berbeda merupakan faktor potensial disintegrasi. Hubungan antar etnik tersebut sesungguhnya dapat diupayakan untuk saling menguntungkan dan saling mengisi. Sampai pada taraf asimilasi dimana kebersamaan menjadi landasan kolektivitas dan menghilangkan segala faktor-faktor potensial pemisah tersebut.

Pada dasarnya manusia hidup adalah untuk mewujudkan kebutuhan dalam rangka memperoleh kemanfaatan, kehormatan, keamanan, dan harga diri. Untuk itulah manusia dalam lingkungannya selalu berusaha memenuhi dengan segala cara dan kemampuannya. Demikian pula kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat, masing-masing berusaha mencari metode yang dianggap memadai untuk menghindari konflik sosial yang setiap saat dapat terjadi dalam lingkungan sosialnya. Masih dapat diusahakan untuk mencari kesamaan nilai-nilai sosial dan budaya yang dapat dijadikan materi dasar guna mencapai terwujudnya integrasi diantara dua etnik tersebut.

PENDAKATAN TEORITIS: TEORI KONFLIK

Teori konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Berdasarkan perspektif teori ini, bahwa dalam masyarakat selalu terdapat kelompok-kelompok sosial yang saling bertentangan, yaitu dengan perwujudan dari pertentangan yang sifatnya terbuka maupun tersembunyi. Konflik adalah manifestasi lanjutan dari timbulnya ketidaksamaan kebutuhan dan kepentingan. Keberadaan konflik atau ketidakselarasan kepentingan bila dalam proses interaksi justru lebih menonjol tumbuhnya kesenjangan diantara yang terlibat (Cosserat dalam Poloma, 1984:119). Pengertian konflik kepentingan secara implisit menyiratkan strategisnya peran dari lingkungan aktifitas ekonomi dan politik. Konflik kepentingan itu terwujud semakin cepat, jika terdapat kesenjangan kesejahteraan dan kekuasaan atas kelompok sosial secara berlebihan. Karena itu konsep kepentingan lebih didasarkan pada suatu dasar nilai persamaan. Jika dalam proses interaksi yang terbentuk adalah demikian halnya, maka akan dapat terabaikannya kelompok yang lemah, dan hal ini menjadi pemicu lahirnya konflik sosial. Ditegaskan oleh Dahrendorf (dalam Poloma 1984:36) bahwa dapat dibedakan kelompok yang terlibat dalam konflik sosial yang terdiri dari dua tipe, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang dominasi (mayoritas) dan memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kelompok kepentingan adalah kumpulan orang yang menginginkan perubahan sistem kekuasaan yang ada.

PENDAKATAN TEORITIS: TEORI KONVERGENSI

Teori konvergensi adalah teori yang menyatakan bahwa pada hakekatnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses interaksi, arahnya sampai menuju titik saling pengertian, persetujuan dan tindakan bersama dengan melalui beberapa tahapan fisik, psikis dan sosial (Effendy, 1989:75). Dengan merujuk penjelasan tersebut, bahwa interaksi sosial pada dasarnya adalah suatu proses dimana pihak yang terlibat di dalamnya melakukan usaha untuk

mencapai kesamaan-kesamaan dalam nilai sosial dan budaya, baik yang diperlihatkan (manifest) maupun tersembunyi (latent). Sejalan dengan itu, interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis antara individu maupun kelompok dengan lainnya. Syarat interaksi sosial adalah adanya komunikasi, sehingga memungkinkan terjadinya kebersamaan dalam makna. Kehidupan bermasyarakat dapat diamati dari adanya interaksi timbal balik secara berkesinambungan antara satu dengan lainnya (Young and Kim dalam Soekanto, 1997:67).

Dalam proses menuju kebersamaan tersebut, selalu tidak lepas adanya aktifitas yang dimulai dari penciptaan makna hingga pendistribusian makna (komunikasi) diantara partisipan untuk mencapai saling pengertian. Pendistribusian makna atau proses saling berbagi informasi (*information-sharing*), mengarahkan individu atau kelompok untuk saling mendekati (*converge*) atau sebaliknya justru menjauhi (*diverge*) untuk mengartikan realitas hubungan sosial. Saling pengertian dan saling setuju terhadap makna/informasi yang didistribusikan akan membawa partisipan ke dalam suasana *mutual understanding*. Dalam proses interaksi tersebut, tujuan untuk menciptakan pengertian bersama tentang realitas sosial tidaklah selalu dapat dicapai. Model konvergensi dalam proses sosial ini menjelaskan tentang bagaimana kecenderungan dua atau lebih individu/kelompok untuk bergerak menuju kepada satu tujuan, atau dengan kata lain bahwa salah satu bergerak menuju individu atau kelompok lain untuk menyatukan diri ke dalam satu pengertian bersama (*convergence*). Namun sebaliknya dengan divergensi, adalah menjelaskan adanya kecenderungan individu atau kelompok yang masing-masingnya berbeda untuk bergerak saling menjauhi (*divergence*). Dengan demikian adanya *convergence dan divergence*, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh pendistribusian makna/informasi dalam proses interaksi sosial (Subarna, 1992:34).

Dalam proses interaksi antar etnik yang partisipannya memiliki diferensiasi sosial dan kultural, keberadaan konvergensi dan divergensi sangat ditentukan oleh intensitas pendistribusian makna diantara partisipan tersebut. Semakin sering terjadi pendistribusian makna akan semakin kuat kecenderungan kearah konvergensi dari pada divergensi, karena kesamaan-kesamaan nilai sosial dan budaya dapat dipertemukan. Namun sebaliknya apabila intensitas rendah dalam interaksi, maka kecenderungan divergensi lebih besar kemungkinannya untuk muncul kepermukaan serta dapat menjadi alasan untuk timbul dan menguatnya konflik (Littlejohn, 1989:47). Dalam hubungannya dengan interaksi antaretnik, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi intensitas terjadinya konvergensi akan semakin *asimilatif* sikap individu atau kelompok etnik tertentu terhadap etnik lainnya. Berdasarkan asumsi ini, maka terdapat kaitan struktural antara interaksi sosial dengan sikap antar etnik dan perilaku antar etnik. Dengan kata lain, intensitas interaksi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku antar etnik pada individu dan kelompok sosialnya, yaitu dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang asimilatif maupun tidak asimilatif.

PENGELOLAAN HUBUNGAN ANTARETNIK

Secara berturut-turut diupayakan adanya program penciptaan perdamaian anti hegemoni sosial oleh kelompok eksklusionis, untuk itu perlu adanya pendekatan emansipatoris yang secara sadar mendukung terdapatnya perbedaan dan meningkatkan partisipasi yang bebas atau terlepas dari belenggu dominasi individual maupun kelompok tertentu, yaitu menuju tercapainya secara benar proses asimilasi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diwujudkan dalam tindakan interaksi dengan intensitas tinggi. Untuk mewujudkannya memang diperlukan gairah empati relasional dalam mengelola perbedaan, yaitu dengan menekan terjadinya konflik sosial. Pengalihan atas menguatnya konflik serta cara-cara

penyelesaian yang sifatnya terpusat pada kekuatan individu maupun kelompok, sedapatnya menuju kepada penerimaan proses sosial untuk mewujudkan kebudayaan baru (asimilasi), meskipun ini dinilai amat sulit.

Menurut Darroch dan Marston (1994), bahwa secara konvensional asimilasi dianggap tidak terhindarkan dari proses industrialisasi di wilayah perkotaan. Minoritas-minoritas etnik harus semakin menyesuaikan diri dengan masyarakat dominan dan menerima standar-standar budayanya, serta berintegrasi dengan struktur sosial masyarakat perkotaan yang lebih luas (Mulyana, 1996:193). Bagaimanapun juga proses sosial ini berguna untuk membuka kemungkinan baru bagi berkembangnya persamaan-persamaan atas kandungan nilai di dalam sistem sosial. Dalam masyarakat yang majemuk, proses asimilasi tidak selalu berjalan dengan cepat dan lancar. Hal ini mengingat masing-masing etnik yang ada memiliki orientasi nilai budaya, sistem sosial dan stereotipe budayanya. Dapat dinyatakan bahwa sikap dan perilaku yang didasari stereotipe ini dapat berubah jika dipengaruhi oleh intensitas interaksi sosial yang tinggi dalam bentuk komunikasi. Pemikiran optimis ini bukannya tidak beralasan. Berdasarkan hasil kerja penelitian lapangan⁴ menunjukkan kesimpulan : bahwa loyalitas etnik dan loyalitas nasional telah mendominasi dua bidang kehidupan, yaitu bidang kehidupan pribadi dan kehidupan umum, sehingga posisi kedua loyalitas tersebut bisa saling melengkapi daripada saling bersaing atau saling terlibat dalam konflik sosial (Koentjaraningrat, 1993:5).

Lebih lanjut kebudayaan baru tersebut, menjadi sebuah transformasi sosial di dalam aspek struktural, sikap dan perilaku nyata dari anggota masyarakat. Adapun transformasi sosial yang dapat ditawarkan¹ meliputi :

- (1) Transformasi Struktural. Struktur konflik adalah¹ seperangkat aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan sosial yang dinilai tidak sesuai. Jika akar penyebab konflik terletak dalam struktur hubungan berdasarkan lingkungan tempat tinggal antara pihak-pihak yang bertikai, maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang ada¹ atau mungkin ada. Dalam konflik yang sifatnya tidak simetris, maka memerlukan adanya perubahan dalam hubungan sosial antara pihak yang dominan dan yang lemah.
- (2) Transformasi Aktor. Bahwa pihak-pihak yang men¹unyai potensi untuk bertikai diarahkan untuk menentukan kembali tujuan hidupnya, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan hidup yang hendak dicapai, serta belajar untuk mengadopsi pandangan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi melalui perubahan yang dilakukan oleh aktor-aktornya sendiri, perubahan pola kepemimpinan, serta perubahan dalam cara mengadopsi nilai-nilai dan keyakinan yang masih baru. Satu hal lagi yang dapat dinilai penting dari kepemimpinan, adalah perubahan situasi dan kepentingan para pengikut atau pendukung yang mewakili suatu komunitas tertentu. Seringkali perubahan di tingkat aktor atau tokoh, diikuti secara amat lambat dan tidak tampak oleh pengikut kelompok.
- (3) Transformasi Persoalan. Konflik ditentukan oleh pihak yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial dengan adanya penerimaan isu atau informasi tertentu. Sehingga setiap muncul isu atau informasi baru, maka konflik yang ada dan berkembang akan kehilangan sifatnya yang khas, dan mengalami perubahan yang nyata. Perubahan posisi masing-masing pihak yang terlibat adalah selaras dengan perubahan kepentingan dan perubahan tujuan. Hal ini juga berdampak pada perubahan transformasi struktural dan transformasi aktor.
- (4) Transformasi Kelompok dan Personal. Pada dasarnya konflik bersumber dari dalam hati dan pikiran manusia, untuk mengubahnya sedapat mungkin menggali persoalan yang ada dalam hati dan pikiran dari pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Dengan meminjam konsepsi atau pandangan dan pemahaman pengikut Buddha, secara psikologis konflik muncul dari *loba* (usaha untuk menguasai), *dosa* (kebencian atau kecurigaan), dan

¹ *moha* (persepsi yang menyimpang). Untuk mengatasinya perlu ditransformasikan ke dalam *aloha* (rekonsiliasi), *adosa* (saling mengakui), dan *amoha* (visi yang jelas dan luas). (McConnel, 1995 dalam Miall et. al., 2000:250).

Intensitas komunikasi dalam konteks antarpribadi dan kelompok semakin menjadi amat penting untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai stabilitas dan keberlangsungan hidup dalam masyarakat yang multi etnik. Dengan institusi tersebut, etnik yang ada dapat mengatasi tekanan situasi hubungan antar kultur dan semakin memudahkan proses akulturasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai Pengelolaan Potensi Konflik Antaretnik ditinjau dari pendekatan konvergensi, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut. (1) Potensi konflik sosial dapat disebabkan oleh satu hal yang pokok, yaitu terdapatnya dominasi etnik tertentu. Ketegangan kultur berdasarkan perbedaan sosial-ekonomi menimbulkan kesenjangan, dan sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial berupa kekerasan. (2) Konflik sosial tidak saja dikarenakan kondisi yang berkembang saat ini, namun faktor-faktor kritis masih kuat melekat pada komunitas. (3) Diperlukan upaya pendekatan integratif untuk mengeliminir potensi yang sewaktu-waktu mengemuka. (4) Sebagai langkah antisipatif, pengelolaan potensi difokuskan pada institusi asimilasi. Pemantapan dan pengembangan peran institusi asimilasi ditingkatkan guna mengintegrasikan kepentingan, kebutuhan, kesadaran, dan kehormatan terhadap masing-masing etnik. Institusi tersebut, dapat dibangun dari komunitas terkecil yaitu keluarga, asosiasi/persekutuan, kerukunan warga setempat sampai dengan taraf yang lebih luas.

⁸ DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju. Bandung.

Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kelembagaan dan Integrasi Nasional*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

³ Littlejohn, Stephen W.. 1989. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company. California.

¹⁰ Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Rajawali. Jakarta.

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rahmat. 1996. *Komunikasi Antar Budaya*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Polloma, Margareth M.. 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*. Rajawali. Jakarta.

⁷ Subarna, Tatang. 1992. *Hubungan Terpaan Media Massa Dengan Sosialisasi Politik Di Kalangan Mahasiswa (Tesis)*. PPS Universitas Padjadjaran. Bandung

PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK ANTARETNIK

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mulyanawkusumah.com Internet Source	4%
2	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	web.iaincirebon.ac.id Internet Source	1%
5	www.answers.com Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	pustaka.pasca.unpad.ac.id Internet Source	<1%
8	www.komvis.com Internet Source	<1%
9	www.happycampus.com Internet Source	<1%

10

informasipublik.jogjaprov.go.id

Internet Source

<1%

11

www.distrodocs.com

Internet Source

<1%

12

dppkad.kaimanakab.go.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off